



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YEYEN HERYANI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 449286

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 949.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 406.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.925 m2/1.680 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 408 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 21.000.000
4. Tanah Seluas 1.921 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 852 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
6. Tanah Seluas 359 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 960 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 170.000.000
8. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 18.500.000
9. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 46.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



2. MOTOR, HONDA NC11A3CA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	110.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.075.000.000

III. HUTANG Rp. 158.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 916.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.